

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, **Prof. Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFra.** dan diterima oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah **H. Wiyatno, S.P.** dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah **H. Edy Pratowo, S.Sos.**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian dampak permasalahan tersebut, tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

- a. Pembayaran Honorarium dan Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan realisasi pembayaran Honorarium dan Perjalanan Dinas yang disajikan pada LRA tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya;
- b. Pelaksanaan dan pembayaran atas kegiatan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan realisasi kedua Belanja Modal tersebut yang disajikan pada LRA tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan hasil pekerjaan Belanja Modal tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu;

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- c. Penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan aset tetap yang belum dilaksanakan secara maksimal yang berdampak pada saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 yang tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan
- d. Penatausahaan Keuangan SKPD dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan SKPD kurang memadai, yang diantaranya ditunjukkan lemahnya verifikasi dan validasi pertanggungjawaban Belanja SKPD oleh PPK SKPD.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan, untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023 maupun pembahasan dan penetapan Perubahan APBD TA 2024.

Pada kesempatan ini, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2023 memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan tersebut untuk merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Selain mengungkapkan informasi hasil pemeriksaan selama Tahun 2023, IHPD juga menyajikan informasi profil entitas antara lain berupa indikator makro ekonomi untuk memberikan gambaran perubahan ekonomi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan alokasi sumber daya ekonomi bagi pemerintah daerah untuk mencapai target pembangunan daerah. Tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi BPK khususnya hasil pemeriksaan kinerja diharapkan dapat berperan serta dalam perbaikan kondisi ekonomi daerah.

Rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI agar segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Kalimantan Tengah beserta jajarannya selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diserahkan sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti 1.033

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



rekomendasi dari 1.466 rekomendasi atau 70,46% dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 – 2023.

BPK berharap pada Tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” menjadi kurang sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id